

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah April 2019 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
33	smslaporgub (+6281xxxxxxx)	Aww,pak banyak ASN di bawah pemprov yg sudah tidak netral dalam pilpres &pileg,bahkan banyak yg menjelekkkan pak Jokowi,saya prihatin dan sdh mengingatkan agar tidak melanggar UU ASN,hanya curhat pak TK www	01-04-2019 07:06	Njih terimakasih Laporannya Silahkan Laporan dilengkapi dengan data Nama, instansinya kirim ke Bawaslu	Laporan Selesai
34	Samsul (semarxxxxxxx)	Assalamu'alaikum. Pak Gubernur, mohon ditinjau lagi kinerja ASN/PNS beserta "kesehatan" instansi yang ada di Jawa Tengah, khususnya di instansi sekolah. Sesuai Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, maka PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional. Hingga saat ini, bisa dipastikan banyak sekolah yang belum mematuhi pasal tersebut (mungkin bukan hanya sekolah). Karena sejauh ini, masih ditemukan adanya honorarium PNS untuk kegiatan/kepanitiaan di sekolah. Padahal di luar gaji pokok PNS tersebut, mereka sudah mendapat berbagai tunjangan dan sertifikasi yang jumlahnya tidak sedikit. Yang lebih memprihatinkan lagi, setelah adanya TPP dan sertifikasi (guru), mereka menjadi lesu untuk ikut dalam kepanitiaan/kegiatan di luar kelas. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian honorarium untuk mereka. Tidak sedikit pula mereka yang menjadi iri dengan GTT/PTT yang mendapatkan honor yang jumlahnya tidak seberapa dibanding TPP/sertifikasi yang mereka terima. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih.	04-04-2019 13:36	njih diteruskan ke yg menanganiDalam Pemberian Honorarium, selama ada dasar hukumnya dapat diberikan, karena nanti apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada, dalam pemeriksaan dari lembaga Pemeriksa,maka akan dijadikan temuan demikian terimakasih	Laporan Selesai

35	pegawai kontrak (jatenxxxxxxxx)	<p>Kepada bapak gubernur yang saya hormati. Saya adalah pegawai kontrak di lingkungan provinsi jawa tengah. Bapak, mungkin ini sedikit curhat kami tentang bagaimana nasib kita kelak kedepannya agar kesejahteraan kami dapat meningkat setara dengan PNS. Kami tau bapak kami hanya pegawai kontrak tetapi bapak, banyak dari kami yang memegang peranan penting di berbagai sektor , bekerja menghasilkan hasil yang terbaik untuk masyarakat. Bahkan bapak kinerja kami melebihi pegawai pegawai yang sudah ada sebelumnya. Tetapi tidak apa apa, itulah gunanya saling mengisi dan menyempurnakan sebuah pekerjaan untuk jawa tengah . Maka dari itu Bapak, mohon kebijaksanaan agar kesejahteraan pegawai kontrak di lingkungan provinsi jawa tengah di sama rata kan dengan pegawai dan juga beban kinerja yang ada, agar kinerja kami sesuai dengan kesejahteraan kami . Terimakasih bapak gubernur.</p>	07-04-2019 19:30	<p>Njih Terimakasih sarannya Njih Terimakasih atas kerja kerasnya, Mungkin anda dapat melihat Kontrak kerjanya, bagaimana dalam penggajian di kontrak tersebut. Dalam memberikan kesejahteraan, harus menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku, namun demikian, pemerintah belum ada dasar peraturanya untuk memberikan kesejahteraan kepada tenaga kontrak, sedangkan PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian terimakasih</p>	Laporan Selesai
----	------------------------------------	--	---------------------	--	--------------------

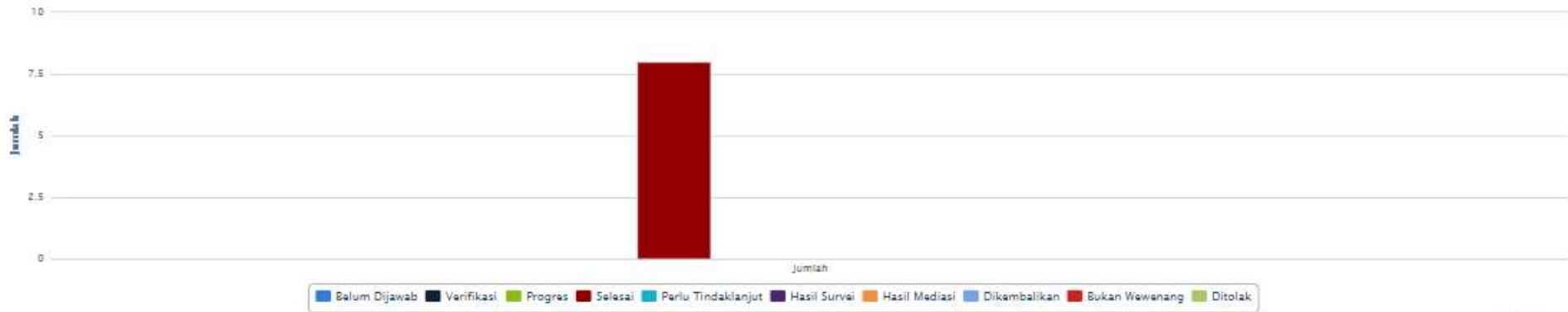
36	luhkitonugroho (No Telepon)	@ganjar_pranowo untuk THL di dinas" kabupaten sistem rekrutmen y masih umpet"an pak,jarang atau nyaris tidak pernah di publikasikan,mohon benahi itu pak,matur nuwun	06-04-2019 13:00	njih terimakasih laporannya Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa : a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya; b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Demikian Terimakasih...	Laporan Selesai
37	me1873aaa (No Telepon)	Pak Ganjar yth... kapan tpp pns pemprov jateng yg pindahan dan baru yg kena aturan diterimakan 50% / tdk full tsb akan berakhir pak ????? katanya awal 2019 ini akan berakhir.. tp smp skg blm ada kejelasan ????????? tolong ya pak.. mohon perhatian ????????? amat sgt berarti dan membantu bagi perekonomian kami ????	06-04-2019 13:00	njih terima kasih diteruskan ke bidang yg menanganiSebgmn Bunyi Pergub Jateng No 15 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 4 dimana PNS beralih tugas/pindahan ke Pemda Jateng setelah melaksanakan tugas selama 1th atau lebih diberikan TPP sbgmn tercantum dlm lampiran I pergub tsb	Laporan Selesai

38	Riko Anka (rikoaxxxxxxx)	Pak ganjar saya mohon bantuan nya. Karena masa depan keluarga saya ada di tangan panjenengan. Saya sudah membuat laporan perselingkuhan beserta bukti foto di hotel kepada BKD provinsi jawa tengah dan INSPEKTORAT provinsi jawa tengah. dan perselingkuhan itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri padahal ayah saya dan ibu saya belum bercerai. saya mohon bantuan nya pak ganjar. dengan harapan agar orang tua saya tidak diganggu oleh orang ketiga. saya mohon sekali pak ganjar memberikan sanksi yg tegas terhadap pegawai negeri yg berselingkuh dengan ayah saya sampai tidur di hotel 2x	15-04-2019 00:06	Njih Terimakasih Informasinya di teruskan ke yang menangani Njih Terimakasih info dari bidang yang menangani sekitar tgl 22/23 April direncanakan akan berkunjung ke rumah untuk menindaklanjuti laporan anda Terimakasih	Laporan Selesai
39	Riko Anka (rikoaxxxxxxx)	Pak Ganjar saya mohon tindakan tegas....ada seorang guru pegawai negeri yg telah menghancurkan keluarga saya serta masa depan saya....dan tidur di hotel 2x bersama ayah saya,padahal ayah dan ibu saya masih belum bercerai.....saya sudah melaporkan dan mengirim bukti foto ke BKD dan INSPEKTORAT Provinsi Jawa Tengah,tetapi malah saya diancam oleh ayah dan selingkuhan nya bahwa akan diancam nyawa saya....saya mohon pak ganjar,tindakan tegas terhadap PNS yg telah menghancurkan keluarga saya,karena mencemarkan nama baik pegawai negeri republik Indonesia serta menjelek kan nama baik jawa tengah....padahal keluarga saya dan ibu saya yg dirugikan,semua bukti sudah saya serahkan ke INSPEKTORAT dan BKD provinsi tetapi saya malah diancam nyawa nya oleh selingkuhan ayah saya bapak Ganjar,saya mohon dengan sangat,karena kehidupan saya bergantung di keputusan panjenengan....saya hanya memperjuangkan keluarga saya,tetapi saya malah diancam oleh ayah dan selingkuhan nya seorang pegawai negeri nuwun....	16-04-2019 19:08	Njih Terimakasih Laporannya Njih Terimakasih info dari bidang yang menangani sekitar tgl 22/23 April direncanakan akan berkunjung ke rumah untuk menindaklanjuti laporan anda Terimakasih	Laporan Selesai

40	audrey25_nathania (No Telepon)	Curhat aja Pak gubernur, ada saudara, pns di wilayah kebumen, karena tak punya momongan, adopsi anak.. Karena minim pengetahuan, proses adopsi berjalan lama.. saat pengajuan anak masuk slip gaji, ditolak ama pegawai kebumen, padahal ada surat resmi bahwa anak tersebut sudah diadopsi... Sekarang babak ibunya udah ga ada, baru deh berasa si anak ga dapat uang pensiun dari keringat ibunya, padahal baru kelas 1 smk..	29-04-2019 15:00	njih diteruskan ke bidang yg menanganikalau boleh tahu PNS mana, karena proses adopsi memang ada aturan dan disahkan pengadilan bisa email data ke bkd@jatengprov.go.id utk di koordinasikan dg Pemkab Kebumen	Laporan Selesai
----	-----------------------------------	--	---------------------	--	--------------------

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2019

Source: laporgub.jatengprov.go.id



No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	8
5	Perlu Tindakanjnt	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		8